



Member of :
COOP
International
Co-operative
Alliance

PROGRAM STRATEGIS DEWAN KOPERASI INDONESIA

H. A.M. NURDIN HALID
Ketua Umum DEKOPIN

Materi : Rapat Koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM RI, Bali 21-23 Maret 2017

Program Strategis 1
Koperasi Pilar Negara

Dasar Pemikiran : Membangun Pemerataan dan Keadilan Ekonomi Bangsa

Dasar Fundamental Kemerdekaan Bangsa

Pembukaan UUD 45 Alenia 4

1. Pancasila
2. Tujuan Nasional

Membangun manusia yang berkeadilan

Pancasila

Sila 2 :

Kemanusiaan

Sila 5 :

Keadilan Sosial

Ekonomi konstitusi

Batang Tubuh UUD
45 Pasal 33 :

1. Sistem
Perekonomian
2. Asas
Kekeluargaan

**Tujuan Nasional
Masyarakat Adil
& Makmur**

Kondisi Ekonomi:

Pelaku ekonomi : Usaha Negara, Koperasi dan Swasta

Kategori Ekonomi : Mikro, Kecil, Menengah dan Besar

Kondisi Ekonomi : Ketimpangan antar pelaku ekonomi, sektor ekonomi, pendapatan dan penguasaan sumber daya ekonomi

Indikator Ekonomi : Pertumbuhan ekonomi, kontribusi PDB, persentase penguasaan aset nasional, tax ratio, persentase penyerapan tenaga kerja

Tujuan Nasional dan Visi Kebangsaan

No	Tujuan Nasional	Visi Kebangsaan	Implementasi dalam Pembangunan
1	Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia	Visi Nasionalisme / Kebangsaan	Sistem Hankamrata
2	Memajukan kesejahteraan umum	Visi Ekonomi	Sistem Perekonomian Nasional (???)
3	Mencerdaskan kehidupan bangsa	Visi Pendidikan	Sistem Pendidikan Nasional
4	Ikut menjaga perdamaian dunia	Visi Politik Luar Negeri	Sistem Politik Nasional dan Luar Negeri

1. *Dasar politik perekonomian Republik Indonesia adalah BAB “KESEJAHTERAAN SOSIAL “ pasal 33 UUD 1945.*
2. *Perekonomian suatu negeri pada umumnya ditentukan oleh tiga hal (1) kekayaan tanahnya, (2) kedudukannya terhadap negeri lain dalam hubungan internasional, dan (3) sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya.*
3. *Terhadap Indonesia harus ditambah satu pasal lagi yaitu sejarahnya sebagai tanah jajahan. (pidato Bung Hatta pada Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946).*

Koperasi Bangun Usaha Yang Tepat Membangun Ekonomi Rakyat

1. Koperasi kumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan aspirasi yang sama dibidang ekonomi, sosial dan budaya;
2. Koperasi wadah ekonomi berwatak sosial (tidak serakah mengeruk kekayaan);
3. Koperasi mendorong pemerataan penguasaan sumber daya ekonomi yang berkeadilan;
4. Koperasi berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama;
5. Koperasi membangun kekeluargaan, kebersamaan, kegotong-royongan untuk mewujudkan kesatuan ekonomi anggotanya;
6. Koperasi membangun jiwa kemandirian (*self help*) dan kersama untuk saling menolong (*mutual help*) dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi anggota;
7. Koperasi membangun jiwa kemandirian dan kepedulian antar sesama serta lingkungan alam.

Koreksi Total Pembangunan Perkoperasian Indonesia

Internal

1. Rendahnya idiologisasi koperasi pada anggota
2. Lemahnya kelembagaan koperasi (instabilisasi kepemimpinan)
3. Lemahnya modal internal koperasi
4. Lemahnya penguasaan pasar
5. Kurangnya inovasi & kreatifitas dalam bisnis koperasi
6. Lemahnya kualitas SDM dan kurangnya profesionalisme di Koperasi
7. Lambannya implementasi & pemanfaatan IT pada bisnis koperasi
8. Rendahnya nilai (*value*) bisnis pada koperasi

Eksternal

1. Instabilisasi kebijakan & kondisi ekonomi, politik dan keamanan
2. Ketidakberpihakan pemerintah pada koperasi
3. Perundangan yang kurang memberikan ruang gerak pada bisnis koperasi
4. Penguasaan sumber daya ekonomi yang tidak adil
5. Infrastruktur penunjang bisnis yang tidak mendukung
6. Kemiskinan dan kesenjangan yang tinggi antar strata sosial ekonomi masyarakat
7. Ketimpangan kemampuan ekonomi yang lebar antar pelaku ekonomi (BUMN, Swasta, dan Koperasi) dan sektor usaha (Pertanian, Pertambangan, dll)

Peran Pemerintah dan DEKOPIN : Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Koperasi

Institusi Koperasi

- 1. Memperkuat ideologisasi koperasi pada anggota**
- 2. Penguatan kelembagaan koperasi sebagai entitas bisnis modern**
- 3. Membangun kultur kreatif, inovatif dan nilai tambah dalam kerangka meningkatkan daya saing koperasi**
- 4. Menerapkan nilai-nilai dan prinsip koperasi sejati**
- 5. Memberikan nilai tambah yang “luar biasa” pada anggota sehingga membangun “loyalitas, komitmen anggota” terhadap koperasi**
- 6. Memperkuat jaringan kemitraan koperasi dengan *stake holder***

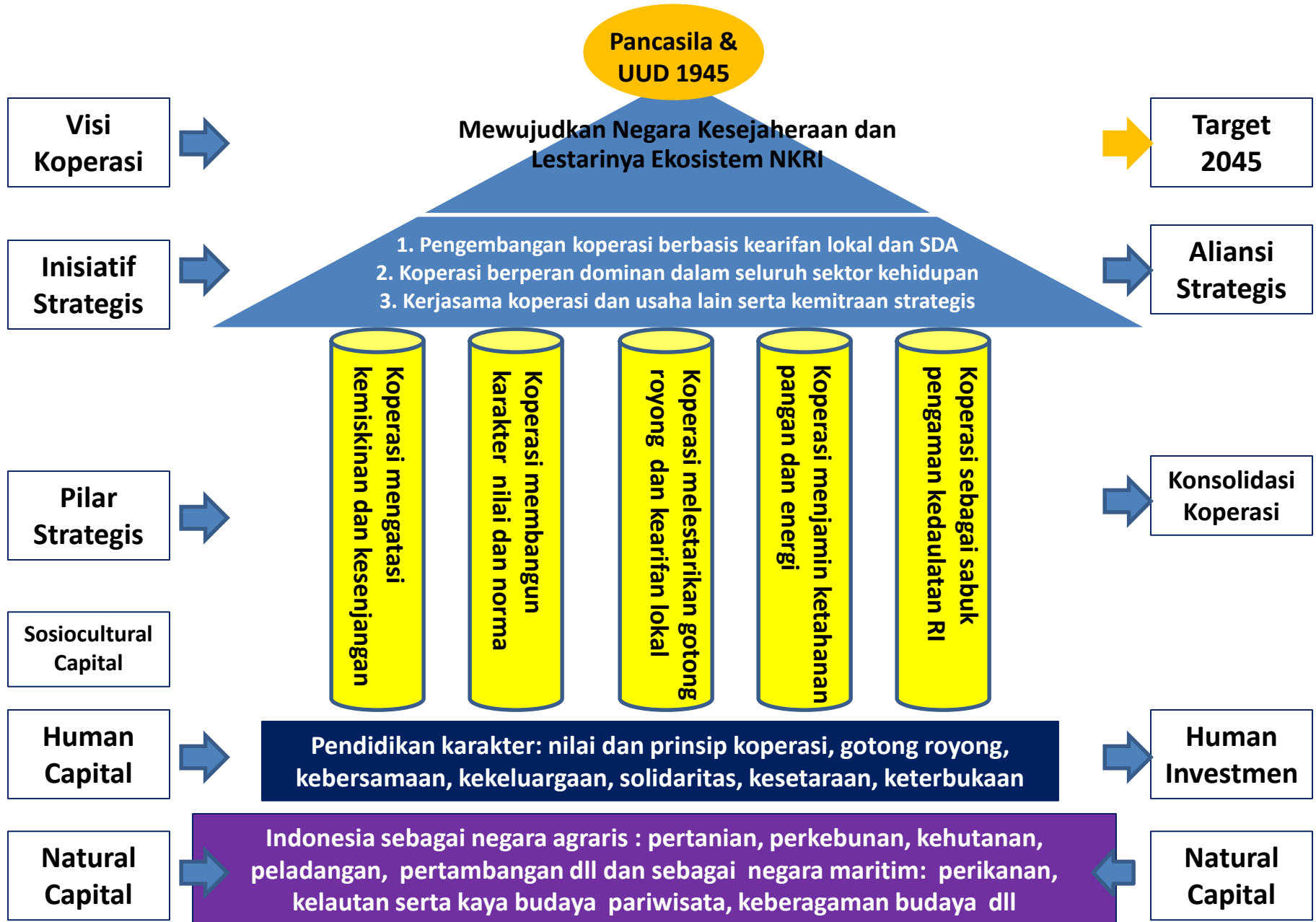
Bisnis Koperasi

- 1. Peningkatan modal sendiri berdasarkan skala ekonomi yg layak**
- 2. Pengembangan bisnis yang inovatif, kreatif dan mempunyai nilai tambah**
- 3. Penerapan manajemen modern pengelolaan koperasi**
- 4. Penerapan IT**
- 5. Kemitraan dengan pelaku bisnis lain**

SDM

- 1. Peningkatan kualitas SDM koperasi**
- 2. Pengembangan sistem kompensasi yang menarik bagi insan koperasi**
- 3. Profesionalisasi manajemen**
- 4. Pengukuran kinerja SDM yang unggul**

Konstruksi : Koperasi Pilar Negara



Konsepsi Koperasi Pilar Negara 1

No	Bagian	Uraian
1	Pengertian	Merupakan dasar dan arah strategi, kebijakan dan program DEKOPIN serta blueprint ICA dalam rangka pembangunan koperasi Indonesia, yang diselaraskan dengan dinamika sosial-ekonomi dan lingkungan lokal , nasional, regional, dan global untuk meraih cita-cita kesejahteraan rakyat dan lestarnya ekosistem NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
2	Maksud	Merumuskan agenda strategis koperasi sebagai pilar negara dalam rangka mewujudkan masyarakat NKRI yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi serta diselaraskan dengan dinamika lingkungan strategis nasional dan global.
3	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi mendukung dan memperkuat NKRI 2. Koperasi mendukung dan memperkuat demokrasi ekonomi dan politik 3. Koperasi mendukung dan memperkuat pelaksanaan Kedaulatan Rakyat menurut UUD 1945 4. Koperasi memperkuat Negara-Hukum NKRI 5. Koperasi mendukung terwujudnya tujuan nasional cita-cita pembentukan Negara dan Pemerintah RI sesuai amanat Alinea IV Pembukaan UUD 1945
4	Visi	Kuatnya karakter bangsa, penyehatan ekonomi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dan lestarnya ekosistem NKRI berbasis nilai-nilai koperasi

Konsepsi Koperasi Pilar Negara 2

No	Bagian	Uraian
5	Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi untuk kesejahteraan rakyat NKRI (<i>Welfare State</i>) 2. Koperasi untuk lestariannya ekosistem NKRI
6	Sasaran / Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk karakter bangsa dan kegotongroyongan 2. Merawat bumi dan menghemat sumber daya alam 3. Menjamin kedaulatan/ketahanan pangan dan energi 4. Melestarikan budaya dan kearifan lokal 5. Menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar
7	Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota koperasi, Mayoritas masyarakat Indonesia berkoperasi 2. Penetrasi Koperasi, Koperasi masuk ke semua sektor kehidupan masyarakat bangsa (sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi) 3. Daya Saing Koperasi, Koperasi-koperasi bertumbuh dan berdaya saing karena manajemen sehat (<i>good cooperative governance</i>) 4. Membumikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, koperasi-koperasi berjalan di atas nilai dan prinsip-prinsip koperasi (sesuai prinsip-prinsip ICA dan UU Perkoperasian) 5. Koperasi menjadi pelaku utama ekonomi rakyat yang menyejahterakan, berkeadilan serta berkelanjutan 6. Koperasi mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energi masyarakat di daerah terpencil, daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil

Strategi Pokok Koperasi Pilar Negara

1. Pemetaan dan pengembangan koperasi berbasis sumber daya dan kearifan lokal
2. Perintisan, pengembangan dan penguatan koperasi produsen dan konsumen
3. Penyehatan dan modernisasi manajemen koperasi berbasis nilai-nilai dan prinsip koperasi
4. Kemitraan lintas kementerian/lembaga dan sektor bisnis skala kecil dan besar
5. Peningkatan daya saing koperasi
6. Penguatan modal sendiri koperasi dari anggota dengan sistem keuangan yang terbuka, transparan dan berbasis IT
7. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tata kelola organisasi dan usaha koperasi

Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi

1. Pengembangan **Koperasi Pertanian**
2. Pengembangan **Koperasi Maritim**
3. Pengembangan **Koperasi Konsumen**
4. Pengembangan **Koperasi Produsen**
5. Pengembangan **Koperasi Pemuda** (siswa dan mahasiswa) dan **Koperasi Wanita**
6. Pengembangan **Koperasi Pekerja**

Program Strategis 2
Kongres Koperasi III

Kongres Koperasi III

1. KBBI (2016) menegaskan bahwa kongres adalah pertemuan besar para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai pelbagai masalah;
2. KONGRES KOPERASI adalah ajang pertemuan besar yang dihadiri para wakil pemangku kepentingan koperasi (pemerintah, DPR/D, DEKOPIN, pelaku/praktisi koperasi, akademisi, peminat dan pengamat koperasi, BUMS, BUMN), untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan strategis dalam rangka memecahkan dan/atau mengantisipasi permasalahan dalam penumbuh kembangan perkoperasian di Indonesia.
3. Kongres merupakan acara puncak dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya, yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan menyampaikan aspirasi dan kesiapannya untuk berperan aktif dalam penumbuh kembangan koperasi Indonesia sebagai PILAR NEGARA.

Kongres Koperasi III

❖ KONGRES KOPERASI ADALAH :

1. Ajang nasional untuk menetapkan arah pengembangan koperasi Indonesia.
2. Diselenggarakan secara rutin dan kontinu, dengan rentang waktu 5 tahun.
3. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan perkoperasian, mencakup gerakan koperasi, pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat peminat koperasi.
4. Memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan perubahan kondisi makro nasional untuk diantisipasi dalam menyusun strategi pengembangan koperasi secara mikro.
5. Memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan arah kebijakan internasional yang diperkirakan akan mempengaruhi pengembangan perkoperasian Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dasar Pemikiran Kongres Koperasi III (1)

1. Pembangunan Koperasi Indonesia selama 70 tahun setelah merdeka belum memiliki fungsi dan peran sebagai soko guru perekonomian.
2. Selama 15 tahun terakhir ini kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk, antar sektor ekonomi, Jawa luar Jawa, dan desa kota semakin melebar.
3. Perkembangan ekonomi domestik akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan.
4. Kemiskinan yang merupakan “blind spot” perekonomian kita akan semakin mengkhawatirkan karena adanya tambahan penganggur yang cukup banyak dan potensi inflasi yang lebih tinggi karena adanya “*imported inflation*” sehubungan dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang kelihatannya sulit dicegah.

Dasar Pemikiran Kongres Koperasi III (2)

5. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sebagian dari kebutuhan pangan kita diimpor dengan jumlah yang cukup besar.
6. Persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara pesaing tetangga kita dan keterbukaan ekonomi yang semakin meningkat karena integrasi ekonomi secara regional dan global.
7. Dalam 30 tahun mendatang, komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh usia produktif.
8. Sejak Kongres Koperasi II tahun 1953 hingga saat ini belum ada Kongres lagi.

Tujuan Kongres III

1. Memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan pembangunan koperasi Indonesia, untuk menyepakati berbagai sasaran dan tindakan yang harus dicapai setiap lima tahun ke depan.
2. Merumuskan dan menyepakati langkah-langkah strategis untuk membangun masyarakat berbasis kerjasama dengan memanfaatkan *roadmap* pembangunan koperasi Indonesia.
3. Mengevaluasi secara rutin pencapaian pembangunan koperasi yang telah dilaksanakan sebelumnya.
4. Melakukan penyesuaian *roadmap* pembangunan koperasi Indonesia dengan perkembangan ekonomi global.

Output Kongres Koperasi III

1. Deklarasi untuk reafirmasi komitmen membangun perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Menyepakati usulan yang akan diajukan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan Sensus Koperasi Nasional (SUSKOPNAS) sekali dalam 10 tahun sebagai dasar penguatan implementasi Roadmap Pembangunan Koperasi;
3. Menyepakati dan meluncurkan Roadmap 30 Tahun Pembangunan Koperasi
4. Menyepakati strategi dan sistem pendidikan perkoperasian 30 tahun mendatang;
5. Menyepakati penyelenggaraan Kongres Koperasi secara regular 5 tahun sekali untuk mengkaji ulang pelaksanaan, melakukan penguatan implementasi, dan menyusun prospek perkembangan koperasi 5 tahunan.

Outcome Kongres Koperasi III

1. Dicantumkannya kembali penjelasan Pasal 33 dalam batang tubuh UUD 1945.
2. Diusulkannya Undang-undang Tentang Perekonomian nasional.
3. Terciptanya koperasi sebagai soko guru perekonomian, yang didukung oleh berbagai Kebijakan dan mengacu pada *roadmap* pembangunan koperasi Indonesia.
4. Terciptanya SDM koperasi handal yang merupakan produk dari sistem pendidikan nasional, yang memenuhi standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan penumbuhkembangan koperasi Indonesia yang berorientasi global.
6. Terciptanya sinergi dari berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penumbuhkembangan perkoperasian nasional berdasarkan *guideline* praksis perkoperasian di Indonesia.
7. Terciptanya sistem pemantauan dan evaluasi kinerja koperasi Indonesia yang terukur dan rutin setiap 5 tahun satu kali.
8. Tersedianya data dan informasi perkoperasian Indonesia yang akurat dan lengkap sebagai dasar penetapan berbagai kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka penumbuhkembangan koperasi Indonesia.

Peserta Kongres Koperasi III

Untuk mendapatkan pengakuan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan perkoperasian, maka berbagai pihak yang akan dilibatkan dalam kongres ini adalah :

1. WATIMPRES
2. PEMERINTAH PUSAT (KEMENKOP, BAPENAS, MENKO PEREKONOMIAN, KEMENRISTEKDIKTI, KEMDIKBUD, KOMINFO)
3. NON-DEPARTEMEN (BI, OJK, KPPU, BKPM)
4. PIMPINAN DPR-RI DAN ANGGOTA KOMISI IV, V, VI, XI DPR-RI
5. KOMITE DAN PIMPINAN DPD
6. PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH (PEMBUKAAN SELURUH GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA BANTAENG, WALIKOTA PADANG, BLITAR, SOLO, KULON PROGO DAN BUPATI KLUNGKUNG, MAUMERE, LAINNYA)
7. TOKOH NASIONAL PERKOPERASIAN (SUBIYAKTO, DAWAM RAHARJO, SOELARSO, SRI EDI SWASONO, LAINNYA)
8. DEKOPIN, DEKOPINDA DAN DEKOPINWIL
6. AKADEMISI PEMINAT DAN/ATAU PENGAMAT KOPERASI (ADOPKOP, PERWAKILAN PTN DAN PTS, IKOPIN, UI, GAMA, UNS, UNAIR, ITB, ITS, UNDIP, UNSRI, USU, IPB, UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MALANG DAN ACEH)
7. LSM YANG BERKOMITMEN PADA PENGEMBANGAN KOPERASI (LSP2I, PAKARTI, AMKI, AKSES)
8. PENGUSAHA (MOCHTAR RYADI, FRANKIE WELIRANG)
9. WORLD BANK (AHMAD SUBAGYO), ADB, IDB.
10. ICA GLOBAL DAN ICA ASIA PASIFIC (PRESIDEN + ROBBY TULUS, BALLU IYER)
11. EURICSE
12. GERAKAN KOPERASI INTERNASIONAL (ANGKASA, CCA, ACO, MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA, GERAKAN KOPERASI ASEAN, ACEDAC, FAIRPRICE, JENOCH)
15. KEIN (SUTRISNO BACHIR, HENDRI SAPARINI,.....)
16. INDUK DAN SEKUNDER KOPERASI (INKOPDIT, INKOPPOL, INKOPPAU, IKPN, ...)
17. KOPERASI BESAR (KODANUA, KOSPINJASA, KPSBU, KSBW, PUSKOWAN JATI, KOP.BATU,)
18. PERWAKILAN MAHASISWA

Terima Kasih

Dewan Koperasi Indonesia

Jl. Raya Pasar Minggu No. 97B Jakarta Selatan

Email: agungsudjatmoko@yahoo.com

Hp: 0813 9904 5855